BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan menurut bahasa berasal dari kata daya yang berarti tenaga/kekuatan, proses, cara, perbuatan memberdayakan.[1] Pemberdayaan merupakan upaya yang dilakukan untuk membangun daya masyarakat dengan cara memberikan dorongan, motivasi, dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimiliki serta berupaya untuk mengembangkannya. Oleh karena itu, pokok pikiran mengenai pemberdayaan ini berkaitan dengan konsep kekuasaan. Konsep kekuasaan ini juga sering dikaitkan dengan kemampuan individu untuk membuat orang lain melakukan apa yang diinginkannya, terlepas dari minat dan keinginan mereka.

Istilah pemberdayaan juga memiliki pengertian berdasarkan konteks budaya dan politik sehingga makna pemberdayaan tidak mudah diterjemahkan ke dalam semua bahasa. Pengertian pemberdayaan sebenarnya mencakup kekuatan sendiri, kemandirian, pilihan sendiri, kedaulatan hidup sesuai dengan nilai-nilai yang dianut seseorang atau masyarakat, kapasitas untuk memperjuangkan hak, kemerdekaan, pembuatan keputusan sendiri, menjadi bebas, kebangkitan, dan kapabilitas. Pemberdayaan adalah upaya yang dilakukan oleh unsur yang berasal dari

[1] Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), hlm. 242.

luar tatanan terhadap suatu tatanan, agar tatanan tersebut mampu berkembang secara mandiri.[2]

Dengan kata lain pemberdayaan sebagai upaya perbaikan wujud interkoneksitas yang terdapat di dalam suatu tatanan dan atau upaya penyempurnaan terhadap elemen atau komponen tatanan yang ditujukan agar tatanan dapat berkembang secara mandiri, jadi pemberdayaan adalah upaya yang ditujukan agar suatu tatanan dapat mencapai suatu kondisi yang memungkinkan untuk membangun dirinya sendiri.

Pemberdayaan memiliki makna bahwa penyelenggaraan pemerintahan desa ditujukan untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat melalui penetapan kebijakan, program dan kegiatan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat. Desa yang otonom memberikan ruang gerak yang luas dalam perencanaan pembangunan sebagai kebutuhan nyata masyarakat dan tidak banyak dibebani oleh program kerja dari dinas atau instansi pemerintah. Jika otonomi desa dapat direalisasikan maka tidak perlu terjadi urbanisasi tenaga potensial ke kota karena desa mampu menyediakan lapangan kerja yang cukup dan menyusun rencana strategis pembanguann sumber daya alam dan manusia secara terpadu.

Salah satunya yaitu dengan melaksanakan suatu upaya pemberdayaan yang dapat mempercepat proses penyiapan masyarakat melalui berbagai pendekatan-pendekatan yang mampu menjadi wadah

---

[2] Nurman, *Strategi Pembangunan Daerah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), hlm. 245

seluruh komponen sumber daya manusia dan kelembagaan yang melibatkan masyarakat dan *stakeholders* agar perencanaan dan proses pemberdayaan dapat berjalan secara terpadu. Proses pemebrdayaan perlu dilaksanakan dengan sangat cermat karena setiap tatanan memiliki karakteristik tersendiri sehingga tidak semua strategi yang berasal dari luar tatanan akan efektif, bahkan dalam banyak hal tidak jarang yang bersifat kontraproduktif.[3]

Menurut Sumaryadi, pemberdayaan masyarakat merupakan upaya untuk meningkatkan harkat lapisan masyarakat dan pribadi manusia. Upaya ini meliputi: a) mendorong, memotivasi, meningkatkan kesadaran akan potensinya dan menciptakan iklim atau suasana untuk berkembang; b) memperkuat daya potensi yang dimiliki dengan langkah-langkah positif mengembangkannya; c) penyediaan berbagai masukan dan pembukaan akses ke peluang-peluang. Upaya-upaya yang dilakukan adalah peningkatan taraf pendidikan, derajat kesehatan, akses kepada modal, teknologi tepat guna, informasi, lapangan kerja dan pasar, serta fasilitas-fasilitasnya.[4]

Konsep pemberdayaan dapat diterapkan pada tingkat individu maupun kelompok dan juga dapat dikaitkan dengan ekonomi, sosial, dan politik.[5] Istilah tersebut dapat digunakan untuk mencirikan berbagai hubungan di dalam rumah tangga atau antara kelompok miskin dan aktor-aktor lainnya di tingkat global. Pemberdayaan organisasi lokal dalam konteks pengelolaan sumber daya berarti memberikan kontrol dan

---

[3] Nurman, *Strategi Pembangunan …*, hlm. 246.

[4] I Nyoman Sumaryadi, *Perencanaan Pembangunan Daerah Otonom dan Pemberdayaan Masyarakat,* (Jakarta: Citra Utama, 2005), hlm. 114.

[5] Mardi Yatmo Hutomo, *Pemberdayaan Masyarakat Dalam Bidang Ekonomi,* (Yogyakarta: Adiyana Pres, 2000), hlm. 1-2

kewenangan yang lebih besar kepada organisasi lokal untuk membuat keputusan yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya. Pembuatan keputusan di tingkat lokal diharapkan dapat lebih mencerminkan permasalahan masyarakat, dan kemudian sumber daya akan dapat dikelola secara lebih efisien, adil, dan berkelanjutan, serta berdimensi kepentingan jangka panjang.

B. Prinsip-Prinsip Pemberdayaan Masyarakat

Dalam upaya peningkatan taraf hidup masyarakat, pola pemberdayaan yang tepat sasaran sangat diperlukan seperti dengan memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk merencanakan dan melaksanakan program-program yan telah mereka tentukan. Upaya pemberdayaan dengan prinsip sentralisasi, deterministik, dan homogen merupakan kebijakan yang harus dihindari. Pendekatan pembangunan melalui cara pandang kemandirian lokal mengisyaratkan bahwa semua tahapan dalam proses pemberdayaan masyarakat desa harus dilakukan secara desentralisasi. Karena itu, upaya pemberdayaan yang berbasis pada pendekatan desentralisasi akan menumbuhkan kondisi otonom di mana setiap komponen akan tetap eksis dengan berbagai keragaman yang dikandungnya. Upaya pemberdayaan yang berciri sentralistik tidak akan mampu mengenali karakteristik spesifik tatanan yang ada dan cenderung atau secara potensial akan mengabaikan karakteristik tatanan.

Terdapat dua prinsip dasar yang selayaknya dianut dalam proses pemberdayaan. *Pertama,* menciptakan ruang atau peluang bagi masyarakat

untuk mengembangkan dirinya secara mandiri dan menurut cara yang dipilihnya sendiri. *Kedua,* mengupayakan agar masyarakat memiliki kemampuan untuk memanfaatkan ruang atau peluang yang tercipta.[6]

Ada dua upaya agar pemberdayaan ekonomi masyarakat bisa dilaksanakan, yaitu:[7]

1. Memberikan bantuan motivasi moril yang dapat berupa pelatihan usaha dan permodalan yang merupakan salah satu faktor penting dalam dunia usaha
2. Memberikan pendidikan wawasan dan pengetahuan yang dapat dilakukan melalui dua cara, yaitu pemberian beasiswa bagi anak yang kurang mampu dan penyediaan sarana-prasarana belajar baik formal maupun non formal

C. Tujuan Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan ditujukan untuk meningkatkan kekuasaan (*power*) dari kelompok masyarakat yang kurang beruntung (*disadvantaged*). Pemberdayaan pada dasarnya menyangkut dua kata kunci, yaitu *power* dan *disadvantaged*:[8]

1. *Power*

   Realitas yang terjadi di masyarakat, antara satu kelompok dengan kelompok masyarakat yang lain sering terjadi kompetisi yang tidak menguntungkan, kelompok masyarakat yang kaya cenderung

---

[6] Nurman, *Strategi Pembangunan …*, hlm. 249
[7] Mardi Yatmo Hutomo, *Pemberdayaan Masyarakat…*, hlm. 38-39
[8] Miftachul Huda, *Pekerjaan Sosial dan Kesejahteraan Sosial: Sebuah Pengantar,* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), hlm. 272-273.

mempunyai kekuasaan absolute. Elit politik yang menguasai jalannya pemerintahan menciptakan relasi yang tidak seimbang sehingga pemberdayaan harus mampu membuka dan mendorong akses yang terbuka agar tidak terjadi dominasi.

2. *Disadvantaged*

Lemahnya kekuatan yang dimiliki salah satu kelompok masyarakat menyebabkan mereka menjadi kurang beruntung. Sehingga pemberdayaan diharapkan mampu menangani masyarakat yang kurang beruntung akibat dari faktor struktural, kultural, dan personal.

Oleh karena itu, menurut saya hakikat pemberdayaan adalah mendorong kekuatan masyarakat untuk membuka akses yang seluas-luasnya agar tidak terjadi monopoli dan dominasi kekuasaan sehingga kelompok masyarakat mampu memanfaatkan potensi maupun sumber daya yang dimiliki untuk mewujudkan kesejahteraan dan kemandirian.

Pemberdayaan menunjuk pada kemampuan seseorang khususnya kelompok yang rentan dan lemah sehingga mereka mewakili kekuatan atau kemampuan dalam beberapa hal. *Pertama,* memenuhi kebutuhan dasarnya, sehingga mereka memiliki kebebasan, dalam arti bukan saja bebas mengemukaan pendapat, melainkan bebas dari kelaparan, bebas dari kebodohan atau bebas dari kesakitan. *Kedua,* menjangkau sumber-sumber produktif yang memungkinkan mereka dapat meningkatkan pendapatannya serta memperoleh barang-barang dan jasa yang mereka perlukan. *Ketiga,* berpartisipasi dalam proses pembangunan dan

keputusan-keputusan yang memengaruhi mereka. Proses pemberdayaan umumnya dilakukan secara kolektif. Namun dalam beberapa situasi, strategi pemberdayaan dapat saja dilakukan secara individual, meskipun pada gilirannya strategi ini tetap berkaitan dengan kolektivitas.[9]

Tujuan yang ingin dicapai dari pemberdayaan adalah untuk membentuk individu dan masyarakat menjadi mandiri, meliputi mandiri berpikir, bertindak dan mengendalikan apa yang mereka lakukan. Kemandirian masyarakat merupakan kondisi yang dialami oleh masyarakat yang ditandai oleh kemampuan untuk memikirkan, memutuskan serta melakukan sesuatu yang dipandang tepat demi mencapai pemecahan masalah-masalah yang dihadapi dengan mempergunakan daya kemampuan yang terdiri atas kemampuan kognitif, konatif, psikomotorik, afektif, dengan pengerahan sumber daya yang dimiliki oleh lingkungan internal masyarakat tersebut.

Dalam praktiknya, pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh banyak pihak seringkali terbatas pada pemberdayaan ekonomi dalam rangka pengentasan kemiskinan atau penanggulangan kemiskinan. Karena itu, kegiatan pemberdayaan masyarakat selalu dilakukan dalam bentuk pengembangan kegiatan produktif untuk peningkatan pendapatan.

Berdasarkan konsep-konsep di atas, maka tujuan pemberdayaan meliputi beragam upaya perbaikan sebagai berikut:[10]

---

[9] Miftachul Huda, *Pekerjaan Sosial…,* hlm. 285

[10] Aprillia Theresia, dkk., *Pembangunan Berbasis Masyarakat,* (Bandung: Alfabeta, 2015), hlm. 153

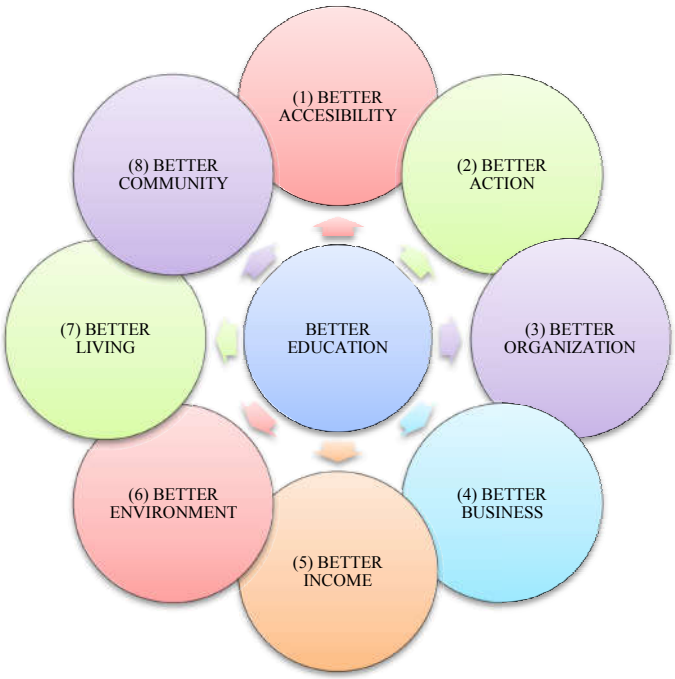

Gambar 2.1 Tujuan Pemberdayaan Masyarakat

1. Perbaikan kelembagaan (*better institution*)

   Dengan adanya perbaikan kegiatan/tindakan yang dilakukan, diharapkan akan memperbaiki kelembagaan, termasuk pengembangan jejaring kemitraan-usaha.

2. Perbaikan usaha (*better business*)

   Perbaikan pendidikan (semangat belajar), perbaikan aksesibilitas, kegiatan, dan perbaikan kelembagaan, diharapkan akan memperbaiki bisnis yang dilakukan.

3. Perbaikan pendapatan (*better income*)

   Dengan adanya perbaikan bisnis yang dilakukan, diharapkan akan dapat memperbaiki pendapatan yang diperolehnya, termasuk pendapatan keluarga dan masyarakatnya.

4. Perbaikan lingkungan (*better environment*)

   Perbaikan pendapatan diharapkan dapat memperbaiki lingkungan (fisik dan sosial) karena kerusakan lingkungan seringkali disebabkan oleh kemiskinan atau pendapatan yang terbatas.

5. Perbaikan kehidupan (*better living*)

   Tingkat pendapatan dan keadaan lingkungan yang membaik diharapkan dapat memperbaiki keadaan kehidupan setiap keluarga dan masyarakat.

6. Perbaikan masyarakat (*better community*)

   Keadaan kehidupan yang lebih baik, yang didukung oleh lingkungan (fisik dan sosial) yang lebih baik, diharapkan akan terwujud kehidupan masyarakat yang lebih baik pula.

D. Tahap-Tahap Pemberdayaan

Proses pemberdayaan dapat terjadi akibat faktor struktur peluang yang meliputi akses informasi, tingkat partisipasi, akuntabilitas, dan kapasitas organisasi lokal. Pemanfaatan berbagai faktor tersebut secara maksimal menciptakan peningkatan keberdayaan baik pada tingkat individu maupun kolektif, dan kemampuan ini pada gilirannya dapat meningkatkan penguatan lembaga lokal dalam meraih berbagai hasil seperti peningkatan kesejahteraan anggota.

Di dalam suatu proses pemberdayaan terdapat beberapa hal yang diperlukan diantaranya seperti penyesuaian, budaya, dan kelembagaan melalui reinterpretasi, reaktualisasi, dan transformasi. Berikut ini

merupakan tahapan-tahapan dalam proses pemberdayaan masyarakat, yaitu:[11]

1. *Getting to know lokal community.* Mengetahui karakteristik masyarakat setempat yang akan diberdayakan, termasuk perbedaan karakteristik yang membedakan masyarakat desa yang satu dengan lainnya. Mengetahui hubungan timbal balik antara petugas pendamping dengan masyarakat.
2. *Gathering knowledge about the lokal community.* Mengumpulkan pengetahuan menyangkut informasi mengenai pola kehidupan masyarakat setempat. Pengetahuan meruapakan informasi faktual tentang distribusi penduduk menurut umur, jenis kelamin, pekerjaan, tingkat pendidikan, status sosial ekonomi, termasuk pengetahuan tentang nilai, sikap, ritual dan *custom,* jenis pengelompokan, serta faktor kepemimpinan baik formal maupun informal.
3. *Identifying the lokal leaders.* Segala usaha pemberdayaan masyarakat akan berjalan apabila tidak didukung oleh pemimpin atau tokoh masyarakat setempat. Oleh karena itu dalam proses pemberdayaan faktor "*the lokal leaders*" harus selalu diperhitungkan karena mempunyai pengaruh yang kuat di dalam masyarakat.
4. *Stimulating the community to realize that it has problems.* Di dalam masyarakat yang terikat dengan adat kebiasaan, sadar atau tidak sadar masyarakat tidak merasakan bahwa mereka punya masalah yang perlu

[11] Nurman, *Strategi Pembangunan* ..., hlm. 247

dipecahkan. Karena itu, diperlukan pendekatan persuasif agar masyarakat menyadari adanya masalah yang perlu dipecahkan dan kebutuhan yang perlu dipenuhi.

5. *Helping people to discuss their problem.* Memberdayakan masyarakat mengandung makna mendorong dan merangsang inisiatif untuk melibatkan diri dalam pembahasan masalah serta merumuskan alternatif pemecahan masalah dalam suasana kebersamaan.
6. *Helping people to identify their most pressing problems.* Masyarakat dibimbing agar mampu mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi serta menetapkan skala prioritas yang paling berpengaruh terhadap kebutuhan dasar. Masalah yang paling krusial dan berdampak pada tatanan kehidupan sosial yang lebih luas yang harus diutamakan untuk dipecahkan.
7. *Fostering self-confidence*. Membangun rasa percaya diri masyarakat dalam menghadapi berbagai persoalan. Rasa percaya diri merupakan modal utama untuk membangun keswadayaan.
8. *Deciding on a program action*. Masyarakat perlu diberdayakan untuk menetapkan suatu program yang akan dilakukan. Program aksi perlu ditetapkan berdasarkan skala priorotas, yaitu rendah, sedang, dan tinggi. Tentunya program dengan skala prioritas tinggilah yang perlu didahulukan pelaksanaannya.
9. *Recognition of strengths and resources*. Memberdayakan masyarakat berarti meningkatkan kapasitas masyarakat dalam mengkaji

lingkungan internal dan eksternal (kekuatan dan sumber daya yang dapat dimobilisasi untuk memecahkan permasalahan dan kebutuhannya).

10. *Helping people to continue to work on solving their problems*. Pemberdayaan masyarakat merupakan serangkaian tindakan terencana yang diarahkan untuk pengubahan kehidupan yang lebih baik secara berkelanjutan untuk memecahkan masalah yang dihadapinya.
11. *Increasing peoples ability for self*-help. Salah satu tujuan pemberdayaan masyarakat adalah untuk meningkatkan kapasitas dan kemandirian agar masyarakat mampu menolong diri sendiri. Keswadayaan menjadi nilai-nilai dasar dalam upaya pembangunan masyarakat.

Model pemberdayaan masyarakat dapat dibedakan melalui tiga tingkat, yaitu mikro, meso dan makro.[12] Pada tngkat mikro, pemberdayaan dilakukan terhadap klien secara individual melalui bimbingan, konseling, *stress management,* serta *crisis intervention.* Tujuan utamanya adalah membimbing atau melatih klien dalam menjalankan tugas-tugas kehidupannya. Model ini sering disebut sebagai pendekatan yang berpusat pada tugas *(task centered approach).*

Pada tingkat meso, pemberdayaan dilakukan terhadap sekelompok klien. Pemberdayaan dilakukan dengan menggunakan kelompok sebagai media intervensi. Pendidikan dan pelatihan, dinamika kelompok, biasanya

[12] Nanang Martono, *Sosiologi Perubahan Sosial: Perspektif Klasik, Modern, Postmodern, dan Poskolonial,* Ed.Revisi Cet.3, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), hlm. 376

digunakan sebagai strategi dalam meningkatkan kesadaran, pengetahuan, keterampilan, dan sikap-sikap klien agar memiliki kemampuan dalam memecahkan permasalahan yang dihadapinya. Terakhir, pada tingkat makro, pemberdayaan diarahkan pada system lingkungan yang lebih *lobbying,* pengorganisasian masyarakat, dan manajemen konflik merupakan beberapa strategi dalam pendekatan ini.

Program pemberdayaan masyarakat perlu memerhatikan konsep pemberdayaan berbasis masyarakat (*community-based).*[13] Prospek pendekatan *community-based* menyimpan sejumlah konteks formal maupun informal yang berpotensi menjadi tantangan yang menghambat pengelolaan sumber daya berbasis masyarakat. Ketiadaan dukungan pemerintah dalam bentuk kejelasan hak-hak pengelolaan sumber daya alam berpotensi melahirkan praktik-praktik degradasi dan pencurian yang dikendalikan oleh jaringan pencurian (oknum aparat, cukong, dan pencuri). Meskipun secara normative pelibatan dan partisipasi masyarakat diakui oleh berbagai kebijakan, dalam tataran implementasi kebijakan-kebijakan pusat tersebut perlu didukung oleh kebijakan daerah untuk menguatkan posisi masyarakat, misalnya dalam pengelolaan sumber daya alam.

Dalam upaya meningkatkan pemberdayaan masyarakat dapat dilihat dari tiga sisi, yaitu:[14]

1. Menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang (*enabling*). Di sini titik tolaknya adalah

[13] Nanang Martono, *Sosiologi Perubahan Sosial…*, hlm. 377.

[14] Edi Suharto, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat,* (Bandung: PT Refika Aditama, 2009), hlm. 99.

pengenalan bahwa setiap manusia, setiap masyarakat, memiliki potensi yang dapat dikembangkan, artinya tidak ada masyarakat yang sama sekali tanpa daya. Pemberdayaan adalah upaya untuk membangun daya itu sendiri, dengan mendorong memotivasikan dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimilikinya seta berupaya untuk mengembangkannya.

2. Memperkuat potensi atau daya yang dimiliki oleh masyarakat (*empowering*). Dalam rangka ini diperlukan langkah-langkah positif, selain dari hanya menciptakan iklim dan suasana. Penguatan ini juga meliputi langkah-langkah nyata, dan menyangkut berbagai masukan (*input*), serta pembukaan akses ke dalam berbagai peluang (*opportunities*) yang akan membuat masyarakat makin berdaya.
3. Memberdayakan mengandung pula arti melindungi, dalam proses pemberdayaan harus dicegah yang lemah menjadi bertambah lemah dikarenakan oleh kekurangberdayaan dalam menghadapi yang kuat.

E. Aktor Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan masyarakat harus melibatkan segenap potensi yang ada dalam masyarakat. Beberapa aspek di antaranya dapat diketengahkan sebagai berikut:[15]

1. Peranan pemerintah. Beberapa upaya yang harus dilakukan antara lain:
   a. Birokrasi harus memahami aspirasi rakyat dan harus peka terhadap masalah yang dihadapi oleh rakyat

[15] April Purwanto, *Modul Kuliah Empowerment yang Berjudul Penduan Umum Pemberdayaan Masyarakat,* Jurusan PMI UIN Sunan Kalijaga

b. Birokrasi harus membangun partisipasi rakyat. Artinya, memberikan kepercayaan yang sebanyak-banyaknya kepada rakyat untuk memperbaiki dirinya sediri. Aparat pemerintah membantu memecahkan masalah yang tidak dapat diatasi oleh masyarakat sendiri

c. Birokrasi harus menyiapkan masyarakat dengan sebaiknya, baik pengetahuan maupun cara bekerjanya, agar upaya pemberdayaan masyarakat dapat efektif di mana hal ini merupakan upaya pendidikan sosial untuk memungkinkan rakyat membangun dengan kemandirian

d. Birokrasi harus membuka dialog dengan masyarakat. Keterbukaan ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat, dan agar aparat dapat segera membantu jika ada masalah yang tidak dapat diselesaikan sendiri oleh rakyat

e. Birokrasi harus membuka jalur informasi dan akses yang diperlukan oleh masyarakat yang tidak dapat diperolehnya sendiri

f. Birokrasi harus menciptakan instrumen peraturan dan pengaturan mekanisme pasar yang memihak golongan masyarakat yang lemah

2. Organisasi kemasyarakatan di luar lingkungan masyarakat sendiri seperti Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang tidak hanya berfungsi sebagai pelaksana program pemerintah, namun juga dapat menjadi pembantu rakyat maupun mengembangkan programnya sendiri

3. Lembaga masyarakat yang tumbuh dari dan di dalam masyarakat itu sendiri atau sering disebut sebagai *lokal community organization* seperti LKMD, PKK, Pokdarwis, dan/atau Karang Taruna.

F. Bentuk-Bentuk Kegiatan Pemberdayaan

Pemberdayaan harus dilakukan secara terus menerus, komprehensif dan simultan sampai ambang batas tercapainya keseimbangan yang dinamis antara pemerintah dan semua segmen masyarakat. Adapun program-program pemberdayaan yang diperlukan adalah sebagai berikut:[16]

1. Pemberdayaan politik, yang bertujuan untuk meningkatkan daya tawar (*bargaining position*) yang diperintah terhadap pemerintah. *Bergainning* ini dimaksudkan agar yang diperintah mendapatkan apa yang merupakan haknya dalam bentuk barang, jasa, layanan, dan kepedulian tanpa merugikan pihak lain.
2. Pemberdayaan ekonomi, diperuntukkan sebagai upaya meningkatkan kemampuan yang diperintah sebagai konsumen agar dapat berfungsi sebagai penanggung dari dampak negatif pertumbuhan, pembayar risiko salah urus, pemikul beban pembangunan, kegagalan program, dan akibat kerusakan lingkungan.
3. Pemberdayaan sosial-budaya, bertujuan meningkatkan kemampuan sumber daya manusia melalui *human investment* guna meningkatkan nilai manusia (*human dignity*), penggunaan (*human utilization*), dan perlakuan yang adil terhadap manusia.

---

[16] April Purwanto, *Modul Kuliah Empowerment yang Berjudul Penduan Umum Pemberdayaan Masyarakat,* Jurusan PMI UIN Sunan Kalijaga

4. Pemberdayaan lingkungan, dimaksudkan sebagai program perawatan dan pelestarian lingkungan, agar pihak yang di[erintah dan lingkungannya mampu beradaptasi secara kondusif dan saling menguntungkan.

Secara umum, kegiatan-kegiatan pemberdayaan masyarakat menurut Mardi Yatmo Hutomo dapat dikelompokkan dalam beberapa kegiatan, yaitu:[17]

1. Bantuan modal

   Pemberdayaan masyarakat dalam hal permodalan merupakan salah satu aspek yang sering dihadapi. Aspek permodalan ini sangat penting dalam melakukan pemberdayaan masyarakat karena apabila tidak ada modal maka masyarakat tidak akan mampu berbuat untuk dirinya sendiri maupun untuk lingkungannya.

2. Bantuan pembangunan prasarana

   Adanya bantuan prasarana dalam melakukan pemberdayaan masyarakat merupakan usaha untuk mendorong masyarakat agar berdaya. Tersedianya prasarana di tengah-tengah masyarakat yang kurang berdaya akan mendorong dan meningkatkan mereka untuk menggali potensi-potensi yang dimilikinya. Selain itu, dengan adanya prasarana akan memudahkan mereka untuk melakukan aktivitasnya.

---

[17] Mardi Yatmo Hutomo, *Pemberdayaan Masyarakat Dalam Bidang Ekonomi,* (Jakarta: Erlangga, 2000), hlm. 7-10.

3. Bantuan pendampingan

Pendampingan masyarakat memang perlu dan penting. Tugas utama seorang pendamping adalah memfasilitasi proses belajar atau refleksi dan menjadi mediator untuk masyarakat. Pendampingan merupakan kegiatan yang diyakini mampu mendorong terjadinya pemberdayaan fakir miskin secara optimal.

Perlunya pendampingan dilatarbelakangi oleh adanya kesenjangan pemahaman di antara pihak yang memberikan bantuan dengan sasaran penerima bantuan. Kesenjangan dapat disebabkan oleh berbagai perbedaan dan keterbatasan kondisi sosial, budaya, dan ekonomi. Oleh karenanya para pendamping di tingkat lokal harus dipersiapkan dengan baik agar memiliki kemampuan untuk memfasilitasi dengan sumber-sumber baik formal dan informal.

4. Penguatan kelembagaan

Adanya sebuah lembaga atau organisasi di tengah-tengah masyarakat merupakan salah satu aspek penting. Fungsi dari keberadaan lembaga tersebut adalah untuk memfasilitasi masyarakat dan memberikan kemudahan dalam melakukan akses-akses yang diinginkan, seperti permodalan, media musyawarah, dan lain sebagainya.

5. Penguatan kemitraan

Pemberdayaan masyarakat adalah penguatan bersama, dimana yang besar hanya akan berkembang kalau ada yang kecil dan

menengah, dan yang kecil akan berkembang kalau ada yang menengah dan besar. Daya saing yang tinggi hanya ada jika keterkaitan antara yang besar dengan yang menengah dan kecil. Sebab, hanya dengan keterkaitan yang adil maka efisiensi akan terbangun. Oleh sebab itu, melalui kemitraan masing-masing pihak akan diberdayakan.

G. Proses Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan sebagai suatu proses merupakan sesuatu yang berkesinambungan di mana suatu komunitas atau kelompok tidak hanya terpaku dengan satu program saja melainkan harus melakukan perubahan-perubahan serta perbaikan dalam rangka peningkatan kesejahteraan suatu komunitas atau kelompok itu sendiri. Proses pemberdayaan masyarakat terdiri dari lima tahap, yaitu:[18]

1. Menghadirkan kembali pengalaman yang dapat memeberdaya guna dan tidak memberdayakan
2. Mendiskusikan alasan mengapa terjadi pemberdayaan tidak memberdayakan
3. Mengidentifikasi masalah
4. Mengidentifikasi basis yang bermakna
5. Mengembangkan rencana aksi dan pengimplementasiannya

Namun disamping itu, dalam proses pemberdayaan bahwa peran serta masyarakat merupakan hal yang paling penting dalam peningkatan pembangunan yang harus dilaksanakan secara berkesinambungan dan terus

[18] Isbandi Rukminto Adi, *Pemikiran-Pemikiran Dalam Kesejahteraan Sosial,* (Jakarta: Fakultas Ekonomi UI, 2002), hlm. 173

menerus sehingga dapat meningkatkan daya yang ada di masyarakat secara maksimal.

H. Desa Wisata

Desa wisata adalah suatu kawasan pedesaan dengan keseluruhan suasana yang asli dan khas baik dari kehidupan sosial-ekonomi, sosial-budaya, adat istiadat, keseharian, memiliki arsitektur bangunan dan struktur tata ruang desa yang khas, kegiatan perekonomian yang menarik, serta memiliki potensi yang dapat dikembangkan, misalnya atraksi, akomodasi, makanan dan minuman, dan kebutuhan wisata lainnya.[19]

Pada dasarnya, desa wisata lebih menonjolkan kearifan lokal dan budaya setempat. Di samping itu, pengelolaannya diprakarsai oleh masyarakat setempat dengan memanfaatkan potensi alam, sosial, ekonomi, budaya, sejarah maupun tata ruang yang ada.

Salah satu hal yang menarik dalam menciptakan suatu kawasan pariwisata ialah berdasarkan kebudayaan yang terdapat pada kawasan tersebut. Kondisi inilah yang mendasari terciptanya kegiatan pariwisata di suatu desa karena kekhasan budaya masyarakat yang mendiami daerah tersebut. Mengutip dalam bukunya Hadiwijoyo, adapun kriteria-kriteria desa wisata adalah sebagai berikut:[20]

---

[19] Timor Mahardika, *Pendidikan Politik Pembangunan Desa,* (Yogyakarta: Pustaka Utama, 2001), hlm. 21

[20] Muhammad Syafi'I dan Djoko Suwandono, Perencanaan Desa Wisata Dengan Pendekatan Konsep Community Based Tourism (CBT) di Desa Bedono, Kecamatan Sayung, Kabupaten Demak, dalam *RUANG,* Volume 1 Nomor 2, 2015, hlm. 51-60, P-ISSN 1858-3881, E-ISSN 2356-0088

1. Aksesbilitasnya baik, sehingga mudah dikunjungi wisatawan dengan menggunakan berbagai jenis alat transportasi
2. Memiliki obyek-obyek menarik berupa alam, seni budaya, legenda, makanan lokal, dan sebagainya untuk dikembangkan sebagai obyek wisata
3. Masyarakat dan aparat desanya menerima dan memberikan dukungan yang tinggi terhadap desa wisata serta para wisatawan yang datang ke desanya
4. Keamanan di desa tersebut terjamin
5. Tersedia akomodasi, telekomunikasi, dan tenaga kerja yang memadai
6. Beriklim sejuk atau dingin
7. Berhubungan dengan obyek wisata lain yang sudah dikenal oleh masyarakat luas.

Komponen utama dalam desa wisata adalah akomodasi dan atraksi. Yang dimaksud akomodasi di sini adalah sebagian dari tempat tinggal para penduduk setempat dan atau unit-unit yang berkembang atas konsep tempat tinggal penduduk. Sedangkan atraksi yaitu keseluruhan kehidupan keseharian penduduk setempat beserta setting fisik lokasi desa yang memungkinkan berintegrasinya wisatawan sebagai partisipasi aktif dalam kegiatan, seperti kursus tari, bahasa, pelatihan kerajinan, dan hal-hal lain yang bersifat spesifik.

Hal-hal yang dapat dicapai dalam proses partisipasi dan terbentuknya desa wisata adalah meningkatkan kemampuan dan penguatan

kelembagaan komunitas lokal melalui proses belajar pengalaman dengan cara melibatkan masyarakat dalam berbagai aspek dari proses pemberdayaan. Oleh karena itu, langkah dan peranan pemerintah maupun masyarakat dalam terbetuknya desa wisata menyangkut tiga hal sebagai berikut:[21]

1. Penyadaran (*conscientization*), yaitu sebuah proses membangun pemahaman yang ditujukan untuk mempengaruhi kesadaran dan perilaku dalam bentuk rencana aksi dan implementasinya sehingga masyarakat paham akan potensi mereka miliki untuk membangun desa wisata yang dikelola masyarakat setempat
2. Pengorganisasian masyarakat (*community organizing*), yaitu upaya pemberdayaan masyarakat agar memahami dan sadar terhadap kerentanan dan kapasitasnya maupun kondisi lingkungannya seta memobilisasi masyarakat dalam merespon permasalahan maupun memenuhi kebutuhannya dengan mengoptimalkan sumber daya yang ada. Sehingga peran serta masyarakat dalam terbentuknya suatu desa wisata sangat utama dan penting.
3. Penghantaran Sumber Daya Manusia (*resources delivery*), yaitu memberikan pengertian serta arahan kepada masyarakat akan keberadaan potensi yang bisa dimanfaatkan sehingga mampu mengelola sumber daya alam maupun manusia.

[21] Timor Mahardika, *Pendidikan Politik* ..., hlm. 25.

I. Pengembangan Desa Wisata

Pengembangan berasal dari kata kerja "berkembang" yang berarti: a) mekar terbuka; b) menjadikan besar (luas, merata); c) menjadikan maju (baik, sempurna). Pengembangan adalah membuat atau mengadakan atau mengatur sesuatu yang belum ada. Pengembangan desa wisata pada dasarnya adalah proses bagaimana sebuah desa dapat berkembang dan sebagai pusat wisata yang memiliki unsur hiburan dan pendidikan. Pembangunan sektor pariwisata sangat potensial sekali untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dengan melibatkan peran aktif masyarakat dalam pengelolaannya.[22]

Pengembangan desa wisata pada dasarnya adalah proses bagaimana sebuah desa dapat berkembang dan sebagai pusat wisata yang memiliki unsur hiburan dan pendidikan. Pembangunan sektor pariwisata sangat potensial sekali untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dengan melibatkan peran aktif masyarakat dalam setiap pengelolaannya.

Upaya-upaya yang perlu ditembuh dalam rangka mencapai suksesnya pengembangan desa wisata adalah sebagai berikut:[23]

1. Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) bisa dilakukan melalui pendidikan, pelatihan dan keikutsertaan dalam seminar, diskusi, dan lain sebagainya serta di bidang-bidang kepariwisataan.
2. Kemitraan atau kerja sama dapat saling menguntungkan antara pihak pengelola desa wisata dengan para pengusaha pariwisata di kota atau

[22] Happy Marpaung, *Pengetahuan Kepariwisataan,* (Bandung: Alfabeta, 2000), hlm. 49
[23] *Ibid.,* hlm. 54-55

pihak pembina desa wisata dalam hal ini pihak dinas pariwisata daerah. Bidang-bidang usaha yang dikerjakasamakan antara lain seperti bidang akomodasi, perjalanan, promosi, pelatihan, dan lain-lain.

3. Kegiatan pemerintahan di desa. Kegiatan dalam rangka desa wisata yang dilakukan oleh pemerintah desa, antara lain seperti rapat-rapat dinas, pameran pembangunan, dan upacara hari-hari besar diselenggarakan di desa wisata.
4. Promosi. Desa wisata harus sering dipromosikan melalui berbagai media.
5. Festival/pertandingan. Secara rutin diselenggarakan kegiatan-kegiatan yang bisa menarik wisatawan atau penduduk desa lain untuk mengunjungi desa tersebut, misalnya mengadakan pertandingan, festival, dan lain-lain.
6. Membina organisasi masyarakat. Penduduk desa yang biasanya merantau kemudian mudik atau tradisi lain dapat dibina dan diorganisir untuk memajukan desa wisata mereka.
7. Kerja sama dengan universitas. Kerja sama sebaiknya dilakukan dengan universitas atau perguruan tinggi yang melakukan pengembangan dan pengabdian supaya dilaksanakan di desa wisata. Hal ini guna membuka peluang dan masukan bagi kegiatan di desa wisata.

J. Pendapatan Masyarakat

Pendapatan masyarakat adalah penerimaan dari gaji atau balas jasa dari hasil usaha yang diperoleh individu atau kelompok rumah tangga dalam

periode tertentu. Pendapatan akan mempengaruhi banyaknya barang yang dikonsumsikan, bahwa sering kali dijumpai dengan bertambahnya pendapatan aka barang yang dikonsumsi bukan saja bertambah, tapi juga kualitas barang tersebut juga ikut menjadi perhatian. Misalnya sebelum adanya penambahan pendapatan beras yang dikonsumsi adalah beras yang kualitasnya kurang baik. Akan tetapi setelah adanya penambahan pendapatan maka kualitas beras yang dikonsumsi menjadi lebih baik.[24]

Tingkat pendapatan merupakan salah satu kriteria maju tidaknya suatu daerah. Bila pendapatan suatu daerah relatif rendah, dapat dikatakan bahwa kemajuan dan kesejahteraan daerah tersebut akan rendah pula. Demikian pula dengan pendapatan masyarakat, jika pendapatan suatu masyarakat relatif tinggi, maka tingkat kesejahteraan dan kemajuan daerah tersebut tinggi pula.[25]

Berikut ini merupakan faktor-faktor yang mempengaruhi pendapatan, antara lain:[26]

1. Jumlah faktor-faktor produksi yang dimiliki yang bersumber pada hasil tabungan dan warisan atau pemberian
2. Harga per unit dari masing-masing faktor produksi yang ditentukan oleh permintaan dan penawaran pasar
3. Hasil kegiatan anggota keluarga sebagai pekerjaan sampingan.

---

[24] Soekartawi, *Faktor-Faktor Produksi,* (Jakarta: Salemba Empat, 2002), hlm. 132.

[25] Mahyu Danil, Pengaruh Pendapatan Terhadap Tingkat Konsumsi pada Pegawai Negeri Sipil di Kantor Bupati Kabupaten Bireuen, dalam *Jurnal Ekonomika Universitas Almuslim Bireuen Aceh,* Vol. IV No.7: 9.

[26] Budiono, *Pengantar Ekonomi,* (Jakarta: Erlangga, 2002), hlm. 150.

K. Penelitian Terdahulu

Untuk membantu memahami seberapa penting dan relevan penelitian ini, di sini penulis menguraikan beberapa hasil penelitian terdahulu dan hasil kesimpulannya beserta persamaan dan perbedaan dengan penelitian ini:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Muhamad, dkk. [27] bertujuan untuk memahami berlangsungnya proses pemberdayaan masyarakat melalui pengembangan desa wisata di Desa Wisata Penglipuran dan implikasinya terhadap ketahanan sosial budaya wilayah. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan teknik analisis data menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Hasil penelitian diketahui bahwa proses pemberdayaan masyarakat di Desa Wisata Penglipuran berlangsung dalam tiga tahap yaitu tahap penyadaran, pengkapasitasan dan pemberian daya. Bentuk-bentuk pemberdayaan masyarakat melibatkan partisipasi masyarakat mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi. Adapun kendala-kendala dalam pemberdayaan masyarakat berkaitan dengan usaha mempertahankan budaya dan adat istiadat dari arus modernisasi, sikap masyarakat, terbatasnya sumber daya manusia dan ketersediaan akomodasi wisata serta kurangnya kegiatan promosi. Pemberdayaan masyarakat melalui pengembangan desa wisata memberikan implikasi terhadap ketahanan sosial budaya wilayah berupa penguatan dan beberapa perubahan pada

[27] Muhamad, dkk. Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pengembangan Desa Wisata Dan Implikasinya Terhadap Ketahanan Sosial Budaya Wilayah (Studi Di Desa Wisata Penglipuran Bali), dalam *Jurnal Ketahanan Nasional*, Vol. 23 No. 1, 27 April 2017, hlm. 1-16.

tata nilai sosial, budaya dan lingkungan. Persamaan dengan penelitian ini adalah sama-sama untuk mengetahui proses pemberdayaan masyarakat dan kendala yang dihadapi dalam proses pemberdayaan. Sedangkan perbedaannya terletak pada tempat penelitian dan implikasi pemberdayaan masyarakat di mana dalam penelitian ini obyek untuk mengetahui implikasi pemberdayaan masyarakat adalah pendapatan masyarakat.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Mustangin, dkk.[28] untuk mengetahui bentuk dari adanya aksi pemberdayaan masyarakat pada program desa wisata. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitiannya adalah studi kasus. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, observasi, dan studi dokumen. Pemberdayaan masyarakat dilakukan dengan mengoptimalkan program desa wisata untuk dijadikan komoditi pariwisata berbasis potensi lokal masyarakat. Desa wisata di Bumiaji telah memberikan perubahan bagi masyarakat terlebih pada peningkatan pengetahuan dan perekonomian masyarakat. Persamaan dengan penelitian ini adalah sama-sama untuk mengetahui bentuk dari pemberdayaan masyarakat melalui program desa wisata. Sedangkan perbedaan terdapat pada implikasinya terhadap pendapatan masyarakat.

[28] Mustangin, dkk., Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Potensi Lokal Melalui Program Desa Wisata Di Desa Bumiaji, dalam *Jurnal Pemikiran dan Penelitian Sosiologi*, Vol. 2 No. 1, Desember 2017, hlm. 59-72.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Made Heny Urnila Dewi, dkk.[29] bertujuan untuk mengkaji keterlibatan masyarakat lokal dalam pengembangan desa wisata dan merumuskan model pengembangan desa wisata yang mengedepankan partisipasi masyarakat lokal. Penelitian dalam tulisan ini dilakukan di desa wisata Jatiluwih Kabupaten Tabanan, Bali. Pengumpulan data dilakukan dengan studi literatur, wawancara mendalam dan observasi non-partisipan. Metode analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif. Tulisan ini menunjukkan bahwa pengembangan desa wisata di Jatiluwih belum melibatkan masyarakat lokal. Peranan pemerintah terlihat dominan, padahal bila mengacu pada pendekatan tata kelola pemerintah yang bersih dan berkelanjutan peran pemerintah diharapkan menjadi fasilitator dengan memberikan peran dan manfaat yang lebih besar kepada masyarakat lokal. Diperlukan kemauan politik pemerintah untuk mengurangi perannya dalam pengembangan desa wisata dengan membuka ruang bagi masyarakat untuk berpartisipasi. Persamaan dengan penelitian ini adalah sama-sama mengkaji tentang pengembangan desa wisata dan peran masyarakat. Sedangkan perbedaannya terletak pada implikasinya terhadap pendapatan masyarakat.

---

[29] Made Heny Urnila Dewi, dkk., Pengembangan Desa Wisata Berbasis Partisipasi Masyarakat Lokal di Desa Wisata Jatiluwih Tabanan, Bali, Vol. 3 No. 2, 17 Agustus 2013, hlm. 117-226.

4. Penelitian yang dilakukan oleh Tuty Herawati[30] bertujuan untuk mengidentifikasi potensi yang dimiliki oleh Kelurahan Pasir Putih dan Kelurahan Sawangan Baru di Depok untuk menjadi desa wisata serta bagaimana peran serta masyarakat desa dalam mengembangan pariwisata yang merupakan program pemerintah daerah sebagai wujud pemberdayaan masyarakat di Depok. Survey dilakukan di 2 tempat yaitu Kelurahan Pasir Putih dan Kelurahan Sawangan Baru. Data diperoleh langsung dari responden yaitu, petani, pelaku usaha, masyarakat dan pemerintah daerah. Object yang disurvey adalah sumber daya yang dimiliki oleh desa, meliputi sumber daya alam, budaya dan cara hidup, seni, hasil karya, fasilitas dan sejarah dari kelurahan tersebut. Dari hasil analisis di dua kelurahan tersebut mempunyai potensi untuk dijadikan desa wisata dimana kelurahan Pasir Putih memiliki sumber daya alam berupa kebun belimbing, kebun jambu dan kebun sayur-sayuran, serta memiliki kesenian daerah calung dan marawis sementara kelurahan Sawangan Baru memiliki potensi kelompok kelompok usaha dalam pengolahan hasil kebun seperti belimbing diproses menjadi jus, sirup, selai, manisan dan lain sebagainya. Model Pemberdayaan Masyarakat dan Penanggulangan Kemiskinan melalui desa wisata, yang diusulkan adalah desa wisata Tipe terbuka (*spontaneus*) system cluster dengan model pengelolaan Ekowisata Berbasis Masyarakat. Persamaan dengan penelitian ini

[30] Tuty Herawati, Model Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Penanggulangan Kemiskinan Melalui Pengembangan Desa Wisata Di Depok, dalam *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, Vol. 10 No. 2, Desember 2011, hlm. 168-175.

adalah sama-sama mengulas tentang pemberdayaan masyarakat melalui pengembangan desa wisata. Sedangkan perbedaannya terletak pada implikasinya terhadap pendapatan masyarakat.

5. Penelitian yang dilakukan oleh Ade Jafar Sidiq dan Risna Resnawaty[31] bertujuan mengkaji keterlibatan masyarakat dalam pengembangan desa wisata dan merumuskan model pengembangan desa wisata yang mengedepankan partisipasi masyarakat lokal. Pengembangan desa Linggarjati Kabupaten Kuningan, Jawa Barat menjadi desa wisata belum melibatkan partisipasi masyarakat. Tantangan dalam proses pengembangan desa wisata di Linggarjati adalah dominasi pemerintah dalam keseluruhan proses. sehingga masyarakat tidak memiliki kesempatan dan kemauan untuk berpartisipasi penuh. Padahal bila mengacu pada pendekatan tata kelola pemerintah yang bersih dan berkelanjutan peran pemerintah diharapkan menjadi fasilitator dengan memberikan peran dan manfaat yang lebih besar kepada masyarakat lokal. Diperlukan kemauan politik pemerintah untuk mengurangi perannya dalam pengembangan desa wisata dengan membuka ruang bagi masyarakat untuk berpartisipasi. Persamaan dengan penelitian ini sama-sama mengulas tentang pengembangan desa wisata dalam memberdayakan masyarakat. Sedangkan perbedaannya terletak pada tempat penelitian dan kendala yang dihadapi serta implikasinya terhadap pendapatan masyarakat.

[31] Ade Jafar Sidiq dan Risna Resnawaty, Pengembangan Desa Wisata Berbasis Partisipasi Masyarakat Lokal Di Desa Wisata Linggarjati Kuningan Jawa Barat, dalam *Jurnal Riset dan PKM*, Vol. 4 No. 1, ISSN: 2442-4480, hlm. 1-140.

L. Kerangka Berpikir

Alur dalam penelitian yang dilakukan terhadap pelaksanaan program pemberdayaan melalui pengembangan desa wisata seperti pada bagan berikut:
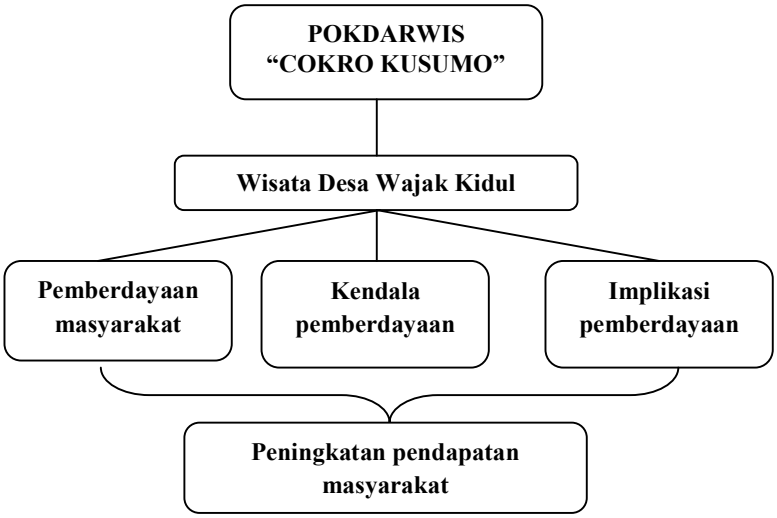
Gambar 2.2
Kerangka Berpikir